



InAng Cestar

Informasi APBN yang Cepat, Transparan, Responsif

Peran APBN
dalam Mendukung
Penyelenggaraan
Pemerintahan,
Pelayanan Publik, dan
Pembangunan Daerah

**Sejarah Baru:
Pendapatan Negara
Tembus Rp3.000
Triliun**

**Pembangunan Zona
Integritas Menuju
Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM) KPPN
Pematang Siantar**

*One Day,
One Fun Fact:*

Hai Gembiralah, dan
Sambut Pemimpinmu.

SELAYANG PANDANG



Dengan memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar berhasil menerbitkan Buletin Inang CETAR Edisi VII Tahun 2024.

Buletin ini disusun sebagai bentuk sarana atau media publikasi informasi, komunikasi dan edukasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar kepada seluruh mitra KPPN Pematang Siantar dan juga seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun terkait perkembangan kinerja keuangan atas pengelolaan APBN yang dilakukan oleh KPPN Pematang Siantar.

Buletin Inang Cetar Edisi-VII kali ini memuat timeline kegiatan KPPN Pematang Siantar sepanjang Triwulan III tahun 2024 serta informasi realisasi APBN periode sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 yang disalurkan oleh KPPN Pematang Siantar.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan buletin Inang Cetar. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buletin tersebut, masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

“ Selamat membaca. Kami harapkan buletin ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi stakeholders dan seluruh masyarakat untuk mendukung keuangan daerah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun dan keuangan nasional menuju Indonesia Maju!

”

Nova Juliana Giantari
Kepala KPPN Pematangsiantar

01

Selayang Pandang

04

Realisasi APBN

14

One Day
One Funfact

05

Realisasi TKD

02

Daftar ISI

06

Artikel

Peran APBN dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pelayanan Publik, dan
Pembangunan Daerah

Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM)
KPPN Pematang Siantar

Sejarah Baru: Pendapatan
Negara Tembus Rp3.000 Triliun

17

Timeline

03

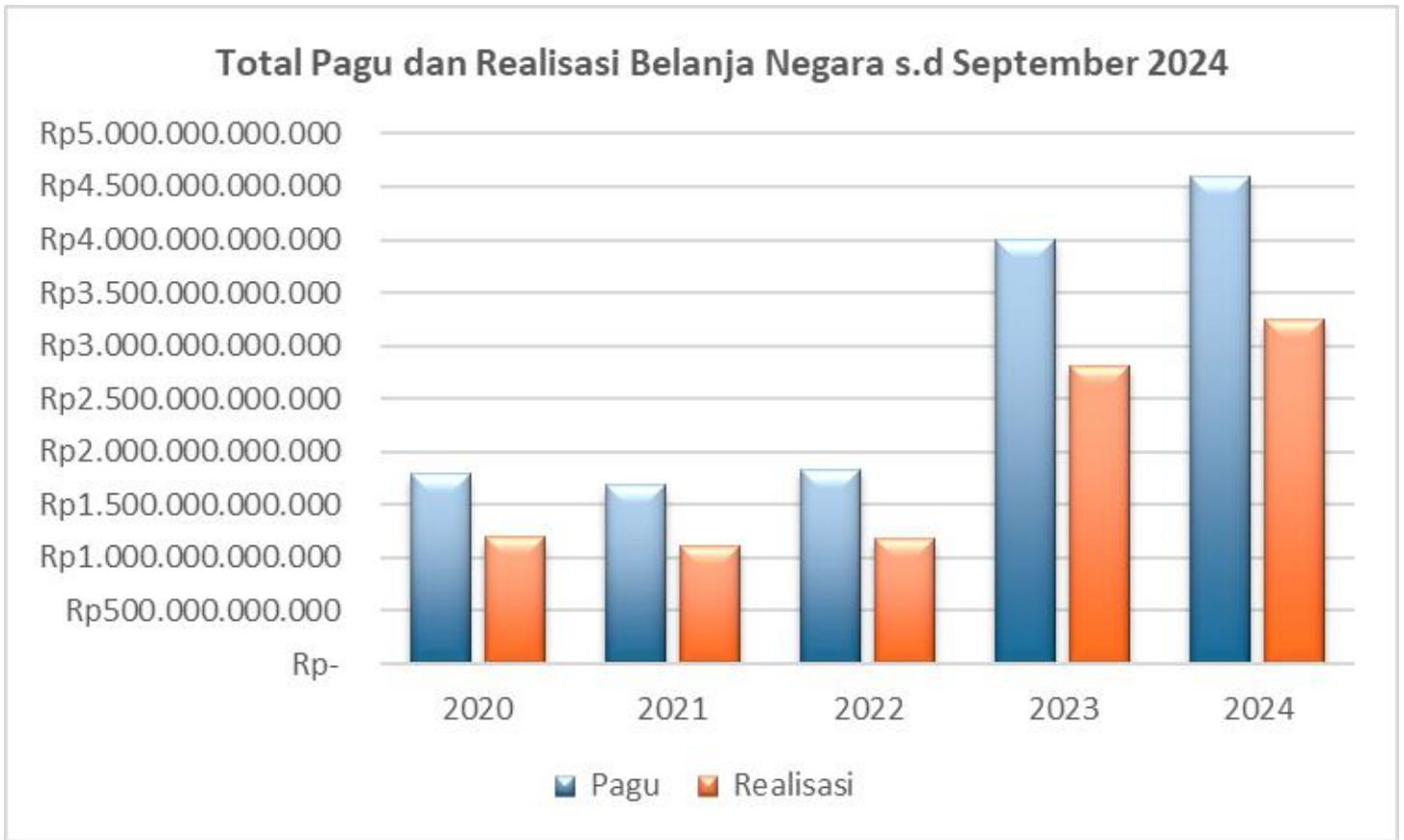
Tajuk Utama

26

Tim Buletin

DAFTAR ISI





Realisasi APBN

Periode 1 Januari 2024–30 September 2024

Oleh: Uli Natasya Girsang, Pelaksana Seksi MSKI KPPN Pematang Siantar

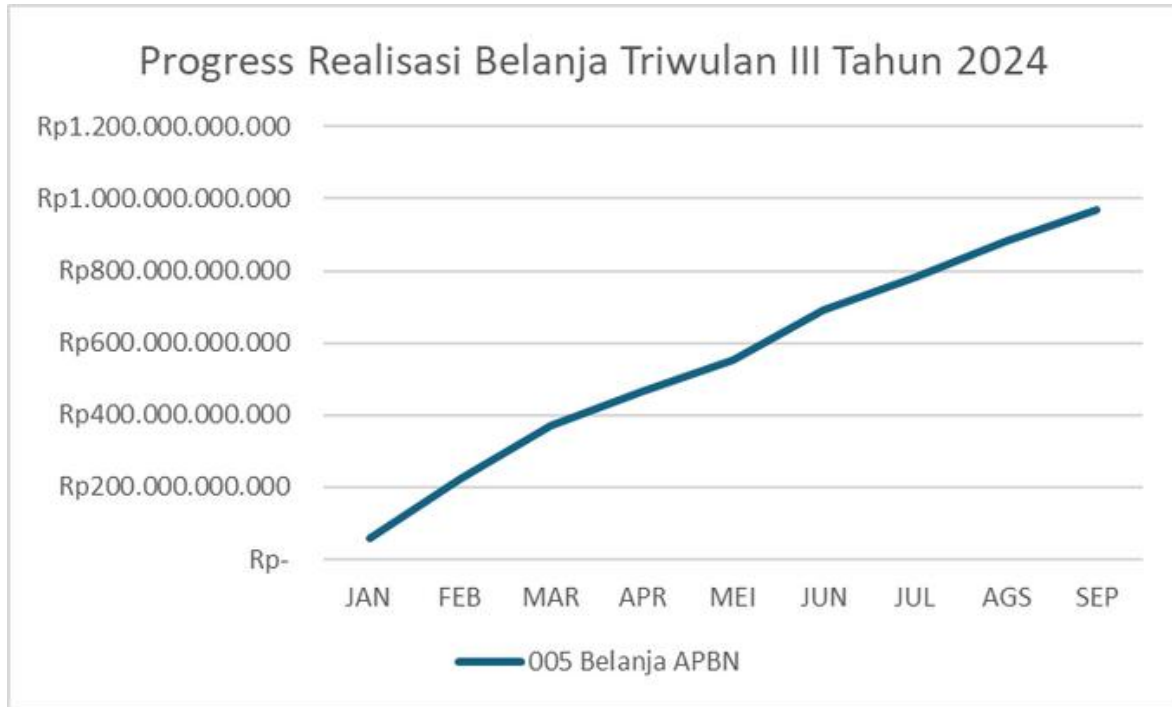
KPPN Pematang Siantar senantiasa mengawal pengelolaan APBN untuk dua wilayah kerja yakni Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sampai dengan berakhirnya Triwulan III Tahun 2024, total pagu anggaran yang dikelola oleh KPPN Pematang Siantar pada dua wilayah kerja yang dimaksud sebesar Rp4,59 Triliun. Realisasi belanja sampai dengan periode 30 September 2024 telah mencapai sebesar Rp3,24 Triliun atau sebesar 70,52% dari total pagu yang dikelola.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang digambarkan melalui Pagu dan Realisasi belanja APBN yang dikelola oleh KPPN Pematang Siantar senantiasa mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada grafik di atas.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama (s.d. September) maka pada TA 2024 merupakan tahun dengan pagu anggaran dan capaian realisasi belanja tertinggi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Pagu anggaran belanja mengalami peningkatan sebesar 14,82% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Disamping itu, capaian realisasi belanja anggaran juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya yakni sebesar 15,13%. Konsistensi peningkatan realisasi belanja yang berkelanjutan sejak semester ini diharapkan sebagai langkah yang baik bagi pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien pada Tahun Anggaran 2024.

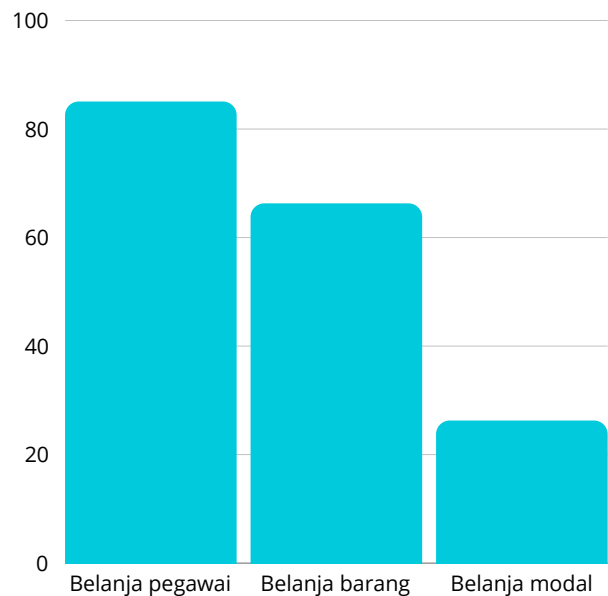
Realisasi APBN TW III Tahun 2024 (Sampai dengan 30 September 2024)

Belanja APBN secara Rinci dapat dilihat progress realisasinya per Bulan sebagaimana pada grafik berikut.



s.d. September 2024, Belanja K/L telah direalisasikan sebesar 69,37% dari pagu anggaran belanja K/L yang terdiri dari realisasi untuk masing masing jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai Rp844,827 Juta (85,07%)
- Belanja Barang Rp495,787 Juta (66,31%)
- Belanja Modal Rp54,407 Juta (26,28%)

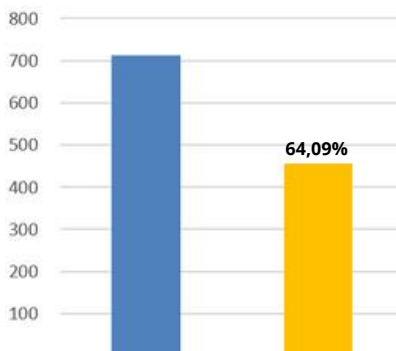


Realisasi Transfer ke Daerah

Periode s.d. 30 September 2024

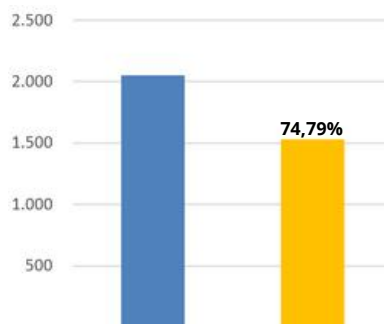
Oleh: Armansyah Putra, Pelaksana Seksi Bank KPPN Pematang Siantar

Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*Spesific Grant*). *Spesific Grant* tersebut terdiri beberapa bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendanaan Kelurahan dan Bidang Penggajian Formasi PPPK.



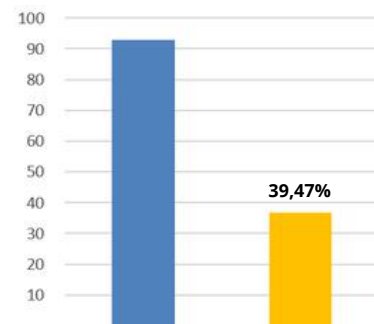
Dana Transfer Khusus

Pagu 711.776.018.000
Realisasi 456.186.651.440



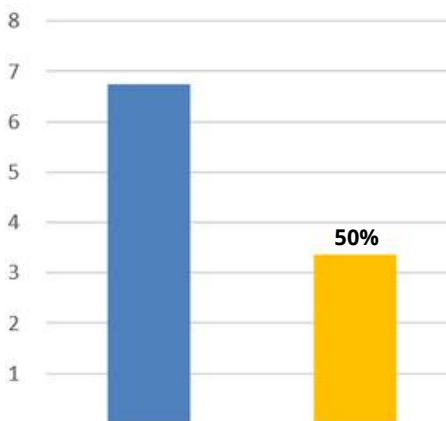
Dana Alokasi Umum

Pagu 2.049.797.287.000
Realisasi 1.533.180.669.110



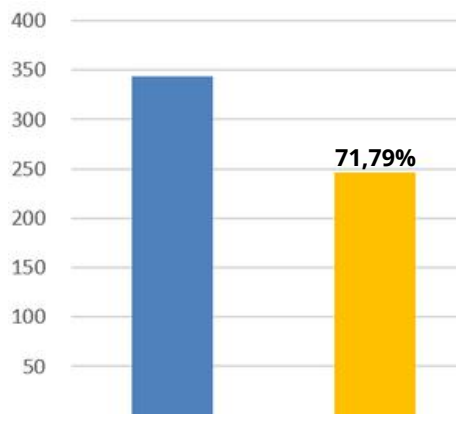
Dana Bagi Hasil

Pagu 92.900.835.000
Realisasi 36.669.898.918



Insentif Fiskal

Pagu 6.737.985.000
Realisasi 3.368.992.500



Dana Desa

Pagu 343.668.854.000
Realisasi 246.742.252.200

- Untuk transfer ke daerah, dari pagu 3,2 T telah disalurkan sebesar 2,27 T atau sekitar 71,02%
- DTK diperuntukkan DAK dan DAK Non Fisik

Peran APBN dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pembangunan Daerah



Oleh: Surya Hadi Purnama

Pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah (88,07%) belum mandiri secara fiskal. Kesimpulan ini didasarkan pada penilaian atas kemandirian fiskal dari 503 pemerintah daerah tahun 2020. Dari 503 pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan indeks kemandirian fiskal (IKF), 443 pemerintah daerah memiliki nilai IKF kurang dari 0,25 (belum mandiri). Kondisi ini menyiratkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sangat rendah. Dengan kata lain lain, ketergantungan daerah terhadap pendanaan eksternal sangatlah tinggi. Sumber utama pendanaan eksternal pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Alokasi APBN ke daerah melalui mekanisme TKD diberikan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pada tahun 2024, total dana APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah dalam bentuk TKD tersebut mencapai Rp857,59 triliun atau 25,79% dari total belanja APBN. Alokasi TKD ini meningkat 3,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp814,7 triliun. Alokasi TKD terbesar dalam bentuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) senilai Rp343,5 triliun disusul DBH (Rp143,1 Triliun), DAK non fisik (Rp133,8 Triliun), DAU yang telah ditentukan penggunaannya (specific grant) sebesar Rp84,2 triliun, Dana Desa (Rp71 triliun), dan DAK Fisik (Rp53,8 Triliun).



Kebijakan dan Target Sasaran TKD tahun 2024

Kebijakan TKD tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan:

- Sinergi kebijakan fiskal dan harmonisasi belanja pusat dan daerah;
- Kualitas dan akuntabilitas pengelolaannya;
- Efektivitas penggunaannya dalam mendukung program prioritas nasional; dan
- Mendorong penggunaannya untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi serta
- Memperkuat kebijakan pengalokasian dan penyalurannya berdasarkan kinerja.

Selain itu, peningkatan TKD dimaksudkan untuk menampung kegiatan prioritas sebagai dukungan penggajian PPPK daerah dan kenaikan gaji pokok ASN daerah, peningkatan pelayanan publik di daerah, operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Dalam bidang pendidikan, alokasi TKD dalam bentuk DAK diberikan dalam rangka revitalisasi 11.721 unit sekolah satuan pendidikan, pembangunan 3 unit satuan pendidikan baru, pembangunan 41 unit gedung layanan perpustakaan, bantuan operasional sekolah bagi 43,7 juta peserta didik dan 46.985 sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan bagi 6,2 juta peserta didik dan 3.644 satuan PAUD Penggerak, tunjangan profesi guru bagi 943,3 ribu Guru PNS Daerah dan 157,4 ribu Guru PPPK, tambahan penghasilan guru bagi 34,3 ribu Guru PNS Daerah dan 16,6 ribu Guru PPPK, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi 890,7 ribu peserta didik, serta bantuan operasional penyelenggaraan untuk 109 museum dan 28 taman budaya.

Dalam bidang kesehatan, alokasi TKD dalam bentuk DAK diberikan dalam rangka penyediaan puskesmas di 48 kecamatan, pembangunan 9 RS Pratama, peningkatan infrastruktur di 12.324 Puskesmas, pembangunan/rehabilitasi 1.539 unit Balai Penyuluhan KB, pengadaan 52 unit alat dan obat kontrasepsi, serta bantuan operasional bagi 10.074 Puskesmas dan 6.229 Balai Penyuluhan KB.

Dalam bidang pariwisata, alokasi TKD dalam bentuk DAK diberikan dalam rangka Pembangunan Amenitas dan Atraksi Kawasan Wisata Bahari dan Perairan di 49 daerah tujuan wisata dan Wisata Alam (Non Bahari) di 29 daerah tujuan wisata, serta Dana Pelayanan Kepariwisatahan bagi 26,3 ribu peserta pelatihan.



Porsi APBN pada APBD Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar

Peran APBN yang demikian besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah bisa dilihat dari proporsi dana APBN pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2023, dari Rp2,39 Triliun pendapatan yang dianggarkan, Rp2,14 Triliun merupakan dana TKD yang berasal dari APBN.

Proporsi dana APBN pada APBD Kabupaten Simalungun dengan demikian mencapai 89,83%. Hal ini sejalan dengan IKF Kabupaten Simalungun yang dirilis BPK pada tahun 2021 yang hanya sebesar 0,0748 (2018), 0,0807 (2019), dan 0,0733 (2020). Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya dapat memenuhi 7,68% dari total belanja APBD, ketergantungan Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap APBN sangatlah besar.

Dari Rp2,14 Triliun dana TKD yang dialokasikan APBN ke APBD Kabupaten Simalungun, alokasi terbesar dalam bentuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) senilai Rp874,7 Milyar kemudian DAK Non Fisik (Rp356,44 Milyar), dana desa (Rp330,74 Milyar), DAU yang telah ditentukan penggunaannya (specific grant) sebesar Rp317,39 Milyar, DAK Fisik (Rp82,2 Milyar), dan DBH (Rp49,49 Milyar).

Setali tiga uang, ketergantungan APBD Kota Pematangsiantar terhadap APBN juga sangat besar. Pada APBD Kota Pematangsiantar Tahun 2023, dari Rp967,66 Milyar pendapatan yang dianggarkan, Rp806,35 Milyar merupakan dana TKD yang berasal dari APBN. Proporsi dana APBN pada APBD Kota Pematangsiantar mencapai 83,33%. Hal ini sejalan dengan IKF Kota Pematangsiantar yang dirilis BPK pada tahun 2021 yang hanya sebesar 0,1400 (2018), 0,1244 (2019), dan 0,1585 (2020). PAD Kota Pematangsiantar hanya dapat memenuhi 13,51% total belanja APBD Kota Pematangsiantar.

Dari Rp806,35 Milyar dana TKD yang dialokasikan APBN ke APBD Kota Pematangsiantar, alokasi terbesar dalam bentuk DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (block grant) senilai Rp460,11 Milyar kemudian DAK Non Fisik (Rp160,09 Milyar), DAU yang telah ditentukan penggunaannya (specific grant) sebesar Rp116,15 Milyar, DBH (Rp24,8 Milyar), dan DAK Fisik (Rp17,15 Milyar).



Penyaluran Dana TKD melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Sesuai amanat Menteri Keuangan, penyaluran dana TKD dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang wilayah kerjanya mencakup Kota/Kabupaten target penyaluran. Sepanjang tahun 2023, KPPN Pematangsiantar selaku unit vertikal Kementerian Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, telah menyalurkan total dana TKD sebesar Rp2,78 Triliun (99,01%) dari pagu alokasi sebesar Rp2,81 Triliun.

Penyaluran Dana DAU sebesar Rp1.78 Triliun (100%), DBH sebesar Rp111.73 Milyar (99,54%), DAK Fisik sebesar Rp91,84 Milyar (92,44%), DAK Non Fisik sebesar Rp455,52 Milyar (95,91%), Dana Desa sebesar Rp340,37 Milyar (99,89%), dan Insentif Fiskal sebesar Rp5,82 Milyar (100%).

Penyaluran dana APBN kepada pemerintah daerah tersebut, selain merupakan pelaksanaan fungsi perbendaharaan (treasury) pada KPPN Pematang Siantar, juga sebagai pelaksanaan peran KPPN selaku financial advisor bagi pemerintah daerah. Pengelolaan Transfer ke Daerah, APBD, serta sinkronisasi APBN dan APBD merupakan pelaksanaan advisory pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan KPPN.

TKD sebagai salah satu instrumen APBN yang mengemban peran penting dalam mendukung berjalannya pemerintahan, pelayanan publik, dan peningkatan sarana dan prasarana di daerah perlu dikelola dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu memastikan pemerintah daerah dapat membelanjakan dengan baik dana TKD yang diberikan dalam upaya pencapaian sasaran dan target prioritas nasional sesuai arah kebijakan yang ditetapkan.

Penguatan Desentralisasi dan Kemandirian Fiskal di Daerah

Selain menjamin optimalisasi penggunaan dan kualitas pengelolaan dana transfer ke daerah, penguatan desentralisasi dan kemandirian fiskal di daerah perlu terus didorong. Rendahnya rasio pajak daerah (local tax ratio) memerlukan upaya yang sungguh-sungguh bagi pemerintah daerah untuk dapat memetakan potensi daerahnya masing-masing dan mengembangkan usaha-usaha kreatif dalam rangka mewujudkan potensi tersebut. Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memungkinkan berbagai upaya untuk mewujudkan hal itu bisa dilakukan.

“ Restrukturisasi, perluasan basis pajak dan penguatan local taxing power perlu terus diupayakan. Sinergi pajak pusat dan daerah melalui pertukaran data/informasi dapat digunakan untuk menggali potensi-potensi penerimaan yang belum dilakukan secara optimal. ”

Pemanfaatan aset daerah yang berlebih/tidak digunakan (idle) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BSG/BGS), kerja sama pemanfaatan, dan skema pemanfaatan aset lainnya dapat menjadi alternatif sumber penerimaan daerah. Dalam rangka investasi di bidang infrastruktur dapat diupayakan pembiayaan-pembiayaan alternatif berupa pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Rasio pinjaman daerah di Indonesia masih sangat rendah (0,049% dari PDB) dibanding rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang yang sebesar 5% dari PDB (2000). Demikian pula, pemanfaatan KPBU dalam rangka penyediaan layanan, sarana, dan prasarana daerah yang masih sangat terbatas.



Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) KPPN Pematang Siantar

Oleh: Yusuf Prihantoro

Pembangunan zona integritas merupakan proses yang berkelanjutan. KPPN Pematang Siantar sebagai bagian dari instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) terus menggiatkan pembangunan zona integritas dan terus berupaya menyebarkan nilai-nilai antikorupsi serta meningkatkan pelayanan bagi stakeholders. Penyebarluasan nilai-nilai integritas dan antikorupsi terus diperdengarkan dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para stakeholders, antara lain dalam kegiatan press release, sosialisasi, maupun bimbingan teknis serta Island of Integrity.

Pada Periode Triwulan III tahun 2024, KPPN Pematang Siantar telah mengadakan penandatanganan MoU Pembangunan Zona Integritas dan sosialisasi kiat sukses meraih WBK kepada para pegawai BPS Kota Pematangsiantar.

Tidak hanya bagi pihak eksternal, pihak internal KPPN Pematang Siantar juga terus diperkuat dalam menjaga integritas melalui kegiatan Sortali (Sharing Our Reaction and Talk About Integrity) dan rapat evaluasi kepatuhan internal dan kinerja. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja layanan KPPN Pematang Siantar, para pegawai juga dilengkapi dengan kegiatan *service excellent* setiap triwulannya dengan menghadirkan narasumber yang andal di bidangnya dan *capacity building* untuk menjaga sinergi dan kolaborasi antar pegawai.



Sejarah Baru: Pendapatan Negara Tembus Rp3.000 Triliun

Oleh: Zulfan, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Pematang Siantar

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 pada Kamis, 19 September 2024. Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Hal ini adalah untuk yang pertama kalinya pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun.

Target penerimaan perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global. Adapun PNBPN dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBPN ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

Sementara untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Jumlah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

Transfer Ke Daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah.

Transfer Ke Daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah.

Menurut Sri Mulyani, tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN. Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025, disepakati pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per US Dolar, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0 persen, Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar US\$82/Barel, dan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0–8,0 persen dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5–5,0 persen, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379–0,382.

Penguatan well-being sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 yang direncanakan antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah dan pemeriksaan

kesehatan gratis. Program ini dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56. Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.

APBN tahun 2025 adalah merupakan APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Mari kita dukung dan kawal APBN 2025 untuk Indonesia Emas, Indonesia Maju.

One Day, One Fun Fact

Gembiralah, dan Sambut Pemimpinmu.

Oleh: Roland Fernando, Kasubbag Umum KPPN Pematang Siantar



Courtesy: [Fikri Rasyid](#) (Unsplash)

Hai sobat cetar, tidak terasa kita telah memasuki kuartal terakhir dari tahun 2024. Sudah tiga perempat tahun kita jalani, dan banyak momen yang kita lalui, baik dari kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan bernegara. Di 2024 ini, kita sudah melewati berbagai peristiwa, salah satunya adalah pemilihan kepala negara dan anggota dewan yang berlangsung di Februari 2024 lalu. KPU selaku lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, beserta 580 orang anggota DPR dan 152 anggota DPD terpilih.

Setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024, selanjutnya kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak se-Indonesia, termasuk kota Pematangsiantar. Pada 23 September 2024, KPU Kota Pematangsiantar mengumumkan penetapan nomor urut keempat pasangan calon walikota dan wakil walikota Pematangsiantar. Pasangan Wesly Silalahi – Herlina di nomor urut 01, Mangatas Silalahi – Ade Sandrawati Purba nomor 02. Kemudian petahana Susanti Dewayani – Ronald Tampubolon nomor 03, dan terakhir Yan Santoso Purba – Irwan mendapatkan nomor urut 04.

Pelaksanaan kampanye dilakukan mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024, dan puncaknya adalah pemungutan suara pada 27 November 2024, bersamaan dengan pemilihan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, dari tingkat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sebagai Warga Negara Indonesia, khususnya penduduk kota Pematangsiantar, selayaknya kita berbahagia dengan momen 5 tahunan ini. Rakyat seluruh Indonesia sudah sepatutnya bergembira dalam memilih kepala daerah yang akan memimpin daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Tidak salah jika pemilihan kepala daerah disebut sebagai pesta rakyat, karena perputaran uang yang terjadi pilkada akan meningkatkan perekonomian daerah bersangkutan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengalokasikan dana pemilu sebesar Rp 11,52 triliun pada 2023 dan Rp 15,87 triliun pada 2024. Belanja tersebut berdampak secara langsung pada konsumsi pemerintah dan berdampak tidak langsung terhadap konsumsi masyarakat.

Tercatat dalam proses pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif, konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto sebanyak 0,75% di 2023 dan 1% di 2024. Sementara Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) juga diproyeksi naik 4,72% di 2023 dan 6,57% di 2024 sebagai dampak dari pengeluaran calon legislatif (caleg). Angka ini tentunya akan bertambah dengan pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 nanti. iantar.



Courtesy: Rio Lecatompessy (Unsplash)

Namun, dampak tersebut seharusnya tidak berhenti sampai di situ saja. Kemajuan kota Pematang Siantar akan menjadi tanggung jawab bagi pasangan walikota dan wakil walikota terpilih selama periode 5 tahun jabatan nantinya, apakah dalam masa tersebut, pemerintahan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk kota Pematangsiantar. Memilih sosok yang akan memimpin kota ini selama 5 tahun ke depan selayaknya menjadi perhatian bagi seluruh warga kota Pematansiantar. Mungkin bisa disamakan dengan hal memilih pasangan hidup. Berbagai faktor dan alasan menjadi pertimbangan, agar kelak tidak menyesal ketika yang dipilih merupakan sosok yang salah.

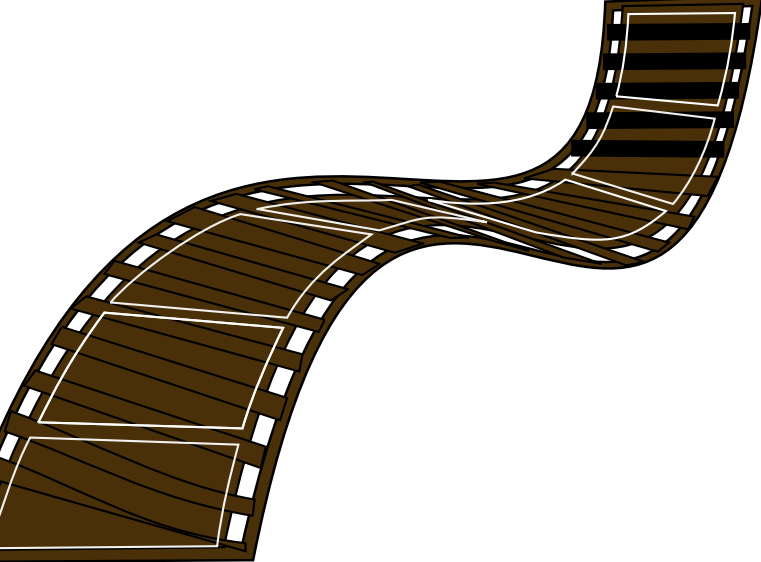
Sebagai warga negara yang bijak, selain taat dalam membayar pajak tentunya, kita juga perlu meningkatkan literasi dalam hal politik. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih mampu terlibat dalam relasi terhadap calon pemimpinnya. Tidak hanya sekedar tahu nama dan wajah calon yang akan dipilih, namun juga terkait program politik yang dikampanyekan, termasuk dengan track record calon bersangkutan. Apakah sosok pemimpin memiliki rekam jejak yang baik, bersih dari perbuatan tercela khususnya tindak pidana korupsi.

Literasi politik juga akan membantu pemilih untuk tidak tergiur dengan politik uang yang dilakukan untuk mempengaruhi dalam pemilihan calon tertentu. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan kampanye, pembiayaannya tidak hanya dari kantong pribadi calon, namun juga donasi dari berbagai pihak yang mengharapkan timbal balik jika terpilih. Pada akhirnya mekanisme seperti inilah yang rentan menjadikan Kepala Daerah terpilih beresiko menerima suap, gratifikasi, dan korupsi anggaran, sehingga kualitas pembangunan berkurang. Maraknya praktik korupsi ini disebabkan oleh politik transaksional tersebut.

Sebagai kasus nyata, dalam periode 2004-2022, sudah 22 gubernur dan 148 bupati/walikota yang telah ditindak KPK. Begitu besar dampak politik uang dalam kontestasi pilkada ini, sehingga calon kepala daerah yang capable akan kalah dengan calon yang memiliki sokongan dana berlimpah. Tentu merupakan kerugian besar bagi masyarakat jika kepala daerah yang terpilih tidak kompeten dalam memajukan daerahnya. Dan tentu saja sangat disayangkan bila kita rela dibayar “hanya” dengan amplop berisi ratusan ribu untuk menukar hak kita mendapatkan calon pemimpin berintegritas yang mampu memajukan daerah.

Jadi, mari kita sambut proses pemilihan pemimpin daerah kita pada 27 November 2024 sekaligus juga meningkatkan pengetahuan dan literasi tentang calon walikota dan wakil walikota. Agar nantinya ketika periode 5 tahun berakhir, kita bisa meyakinkan hati bahwa pemimpin yang terpilih merupakan sosok yang tepat memimpin kota ini. Mari, semangatlah menjelang pesta demokrasi. Selayaknya kita menyambut momen ini dengan kebahagiaan. Hai gembiralah, dan sambut pemimpinmu.





2024

TIMELINE JULI

4



Psikoedukasi "Mencegah Burnout di Tempat Kerja"

4



Sosialisasi Optimalisasi IKPA, Implementasi Digitalisasi Pembayaran, dan Meminimalisir Retur SP2D

9

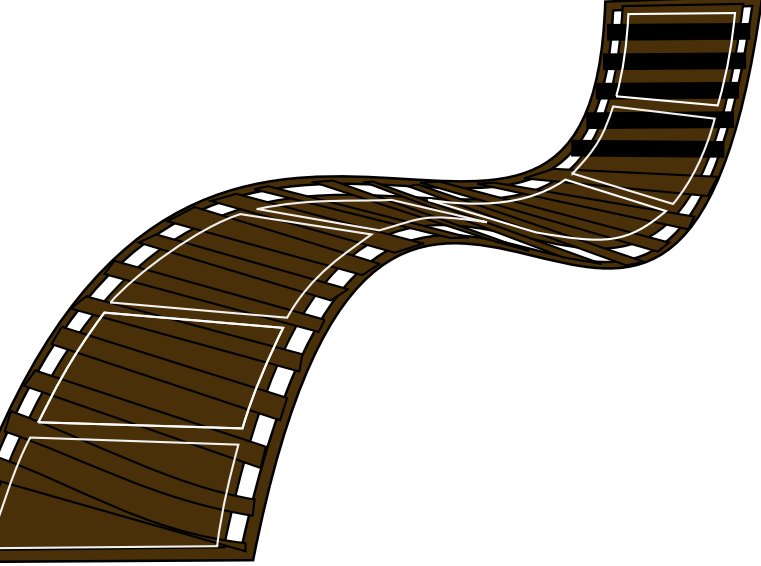


FGD Penyaluran Transfer ke Daerah Tahun 2024 dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2024

10



Rapat High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pematangsiantar



2024

TIMELINE JULI

22

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN, DIGITALISASI PEMBAYARAN, PEMBINAAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, DAN PENGENDALIAN RETUR SP2D BULAN JULI 2024



Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, dan Pengendalian Retur SP2D Bulan Juli 2024

22



Rapat Penyelesaian Rekonsiliasi Setoran Pajak Pusat atas Beban APBD Kota Pematangsiantar

22



Marsitandaan
VOL.3

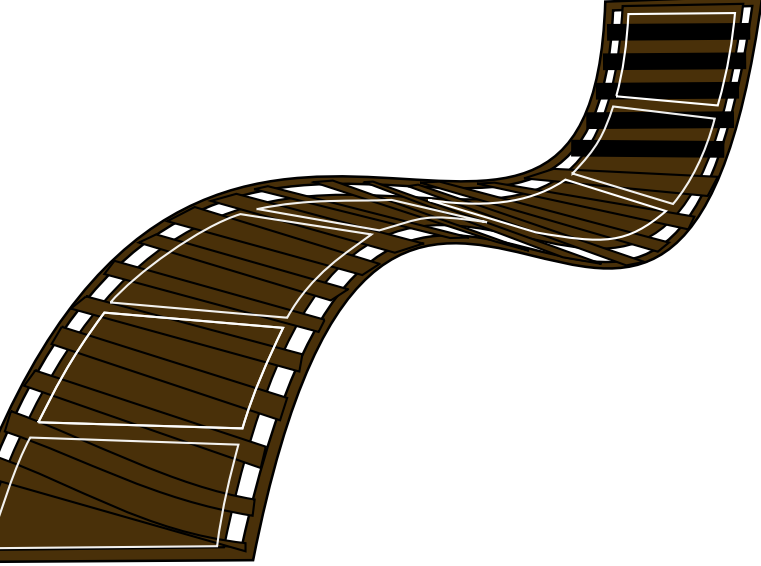
Marsitandaan, Pengembangan Relasi Dengan Pegawai KPPN Pematang Siantar

24



Press Release APBN Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker K/L Periode S.D. Juni Tahun 2024

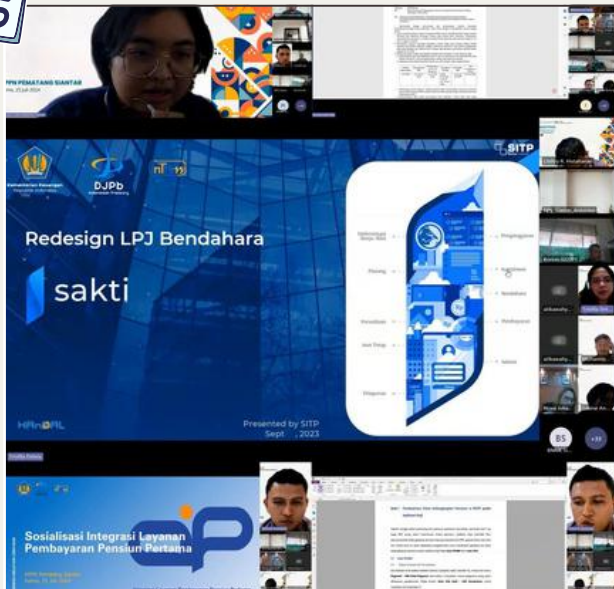
Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian/Lembaga



2024

TIMELINE JULI

25



Asistensi Rekonsiliasi Data dan MonSAKTI

26



MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN, DIGITALISASI PEMBAYARAN, PEMBINAAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, DAN PENGENDALIAN RETUR SP2D BULAN JULI 2024
Badan Narkotika Nasional Kab.Simalungun

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, dan Pengendalian Retur SP2D Bulan Juli 2024

30



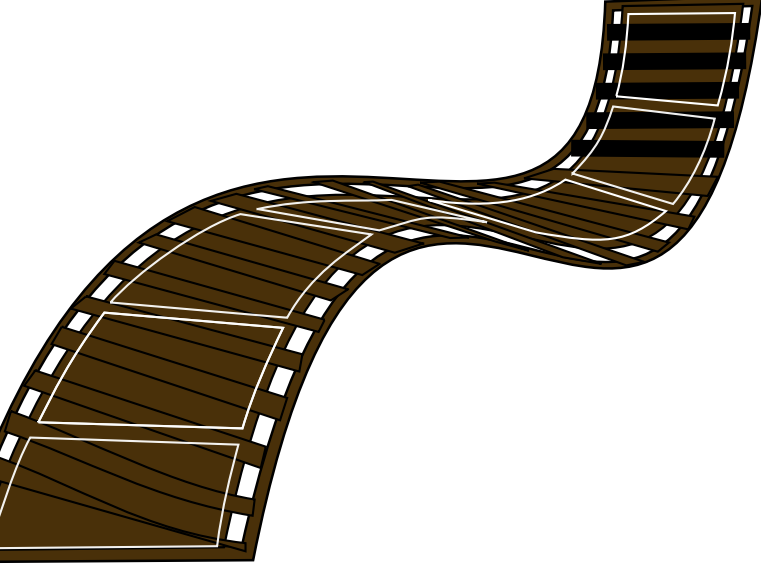
MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN, DIGITALISASI PEMBAYARAN, PEMBINAAN PEJABAT PERBENDAHARAAN, DAN PENGENDALIAN RETUR SP2D BULAN JULI 2024
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun

Monev Pelaksanaan Anggaran, Digitalisasi Pembayaran, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, dan Pengendalian Retur SP2D Bulan Juli 2024

31



Refreshment Cash Management Triwulan III 2024 dan Sosialisasi Pasar Modal Indonesia



2024

TIMELINE AGUSTUS

5



KPPN Pematang Siantar memperoleh Piagam Penghargaan sebagai Financial Advisor atas Dukungan Dalam Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2024 dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematang Siantar KESDAM I/BB

6



Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) Forum Kerja Sama Peningkatan Kualitas Data Rekening Penerima Pembayaran dan Penerapan Cashless Society

7



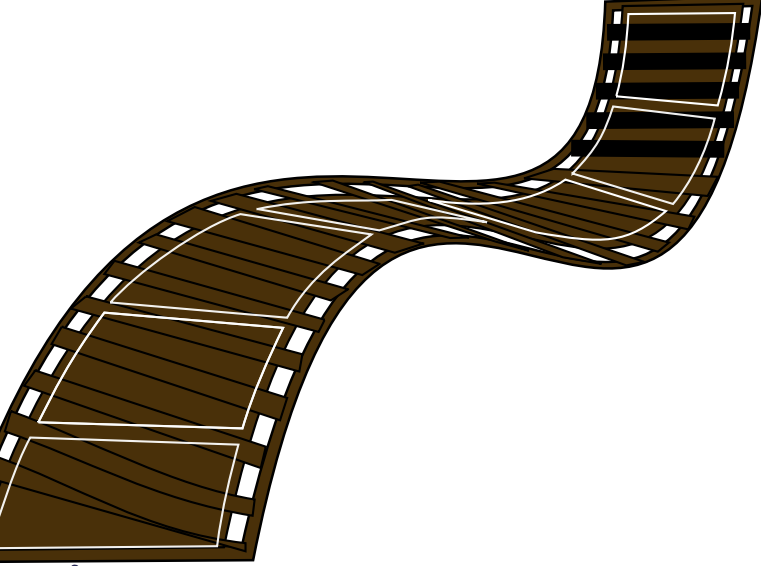
GKM Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, serta Pelaksanaan Kegiatan Reviu SOP

KPPN Pematang Siantar melaksanakan kegiatan GKM Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan, Evaluasi Kepatuhan Internal dan Kinerja, serta Pelaksanaan Kegiatan Reviu SOP.

8



KPPN Pematang Siantar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yakni PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan Koperasi Mitra Dhuafa dengan mengundang UMKM Binaan KPPN Pematang Siantar dan para pelaku usaha yang didampingi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Pematangsiantar



2024

TIMELINE AGUSTUS

9



9 AGUSTUS 2024
SENAM SEHAT KEMENKEU SATU X
MANTAP PEMATANGSIANTAR

KPPN Pematangsiantar berkolaborasi dengan Mandiri Taspen Pematangsiantar dan Kemenkeu Satu Pematangsiantar melaksanakan kegiatan Senam Bersama di halaman kantor KPPN Pematangsiantar

15



Kegiatan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian/Lembaga Periode s.d. Juli 2024

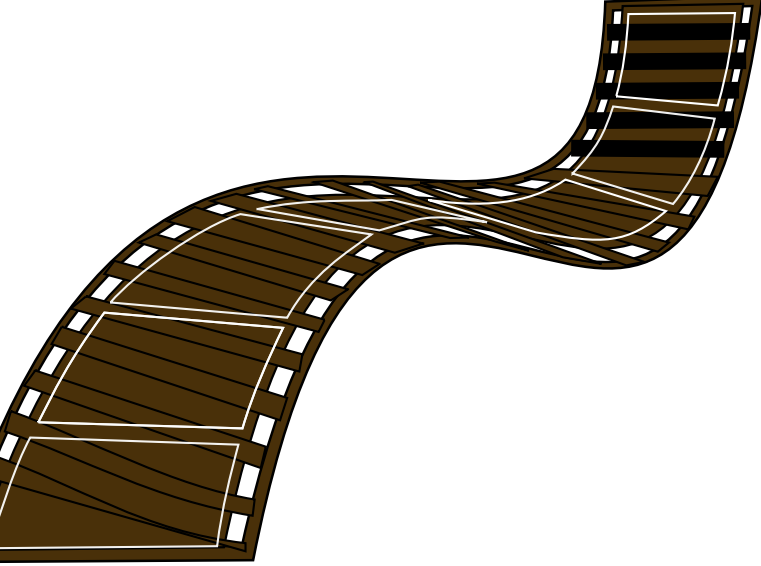
17



KPPN Pematang Siantar menerima penghargaan dari Kantor Pertanahan kab. Simalungun sebagai Financial Advisor atas Dukungan dalam Penerapan Cashless Society (Cash Management System (CMS), Digipay Satu, dan Kartu Kredit Pemerintah) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Semester I Tahun 2024



KPPN Pematangsiantar bersama kantor vertikal Kemenkeu Satu Pematangsiantar melangsungkan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bertempat di halaman Kantor Wilayah DJP II Sumatera Utara



2024

TIMELINE SEPTEMBER



FGD Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah
Bulan September 2024



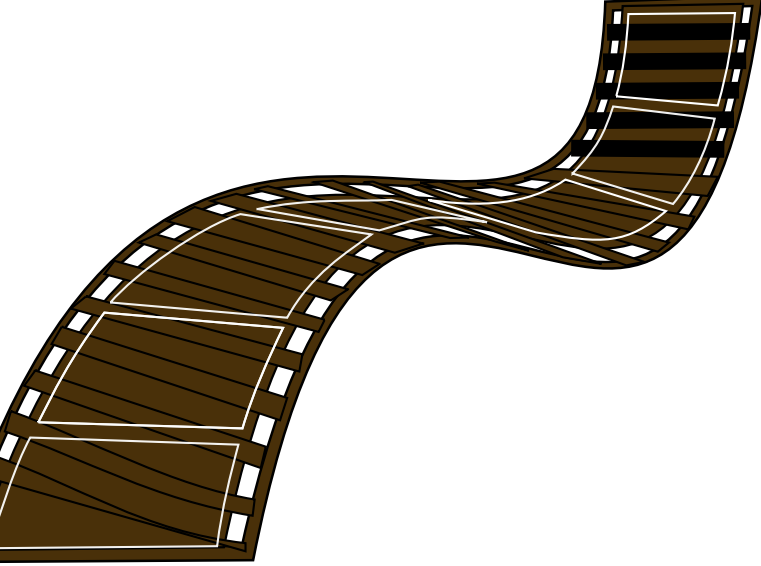
Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi
Data PFK dengan PT Taspen Cabang
Pematang Siantar



Capacity Building Triwulan III 2024 dengan
tema "Profesionalisme Dalam Bekerja"



KPPN Pematang Siantar sebagai anggota
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) ikut dalam kegiatan Bulan Inklusi
Keuangan Kota Pematangsiantar



2024

TIMELINE SEPTEMBER



Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian/Lembaga



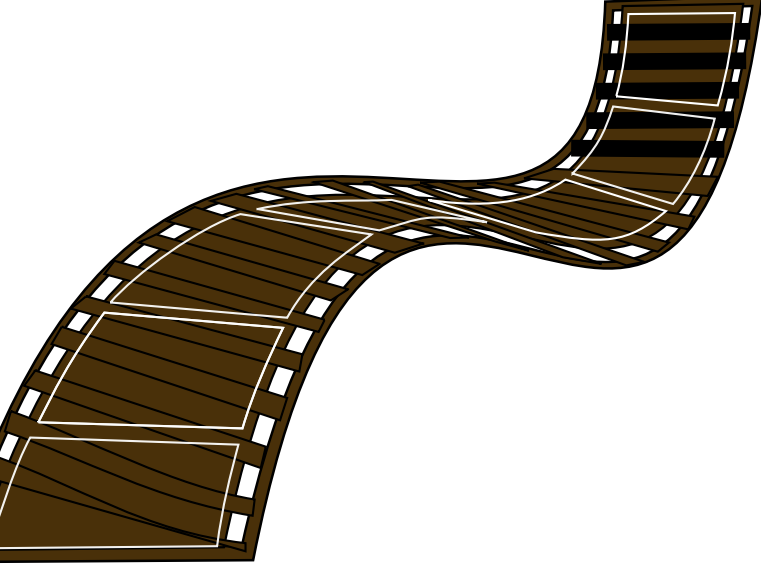
Monev Pelaksanaan Anggaran ke Lembaga Per masyarakatan Pematang Siantar



Sharing Session DISONTABO dengan tema Pola Hidup Sehat



Pelatihan Pemadaman Kebakaran bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pematang Siantar

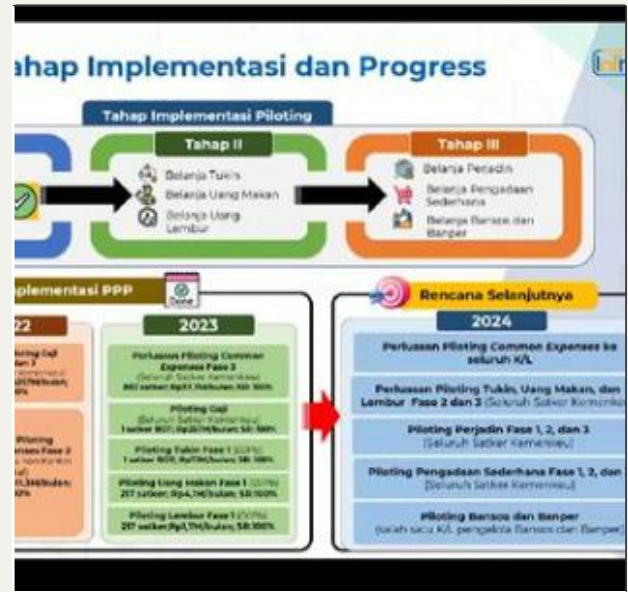


2024

TIMELINE SEPTEMBER



Kunjungan Silaturahmi Bapak Darmawan, Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, di KPPN Pematang Siantar



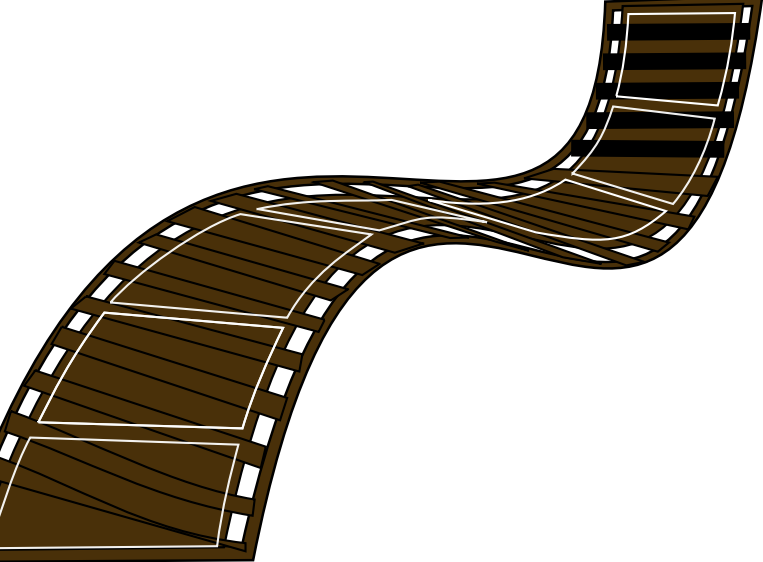
Sosialisasi Pembayaran Common Expenses melalui Platform Pembayaran Pemerintah Satker Mitra KPPN Pematang Siantar



Asistensi dan Sosialisasi, yaitu Asistensi Rekonsiliasi dan Data Monsakti dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Satker Periode September 2024, Sosialisasi Digitalisasi Keuangan Negara, Asistensi Aplikasi SAKTI Periode September 2024 dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran (CMS, KKP, VA, Digipay) Periode September 2024



Focus Group Discussion (FGD) Refreshment Bendahara terkait Pengelolaan Kas dan Rekening pada Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar



2024

TIMELINE SEPTEMBER



FGD Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tema Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Tuan Rondahaim



Olahraga Rutin :Badminton



Pelaksanaan Bintel Islam



Pelaksanaan Bintel Kristen berlokasi di KPKNL Pematangsiantar

TIM BULETIN



Nova Juliana Sianturi

Penanggung Jawab
dan Pengarah

Roland Fernando

Pemimpin Redaksi



**Angelica Ester J
Tampubolon**

Sekretaris Media



KONTRIBUTOR

Zulfan



**Tommy Hansen
Panjaitan**



Surya Hadi Purnama



Yusuf Prihantoro



Anggiat Tambunan



**Chiltry R
Hutahaean**



Trisfila Delvia



EDITOR

**Roby Adiyansyah
Sinaga**



**Armansyah
Putra Barus**



Norman Rilo Turnip



Prima Sari Rumapea



PENATA LETAK DAN GRAFIS

**Imelda Octavia
Damanik**



Nelly Desima S.



**Louise Andrea
Medeleine Sianturi**



**Ranissa Patriska
Purba**



COPYWRITER

**Nurhawati
Tampubolon**



Muhammad Fadly



Uli Natasya Girsang



FOTOGRAFER

Boby

